

NEGARA DAN INTEGRASI ETNIS CINA DI INDONESIA

Andreas A. Susanto*)

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman etnis yang cukup berwarna-warni, tentu bukan tanpa alasan apabila semboyan nasionalnya menyerukan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun demikian etnis Cina yang diperkirakan sekitar 4 persen dari total penduduk Indonesia, tetaplah tinggal sebagai kelompok etnis tersendiri. Lepas dari sejarah panjang keberadaan mereka sejak sebelum abad ke-15 lalu, dan fakta bahwa hampir semua sekarang telah menjadi warganegara Indonesia, orang Cina masih tetap dirasakan sebagai outsider oleh sebagian besar warga yang menyebut dirinya pribumi.

Keberhasilan dan dominasi ekonomi etnis Cina telah melahirkan kecemburuan, kebencian, dan permusuhan. Sementara orang Cina sendiri merasa mereka hanya dijadikan kambing hitam dari berbagai kekecewaan politik. Paralel dengan pengalaman orang Yahudi di Eropa dahulu, orang Cina di Indonesia juga dikenal sebagai pedagang yang pintar dan sukses, kurang sosial atau kurang bermasyarakat, dan rentan secara politis.

Tulisan ini akan membahas keterpisahan etnis Cina di Indonesia yang terus berlanjut sejak jaman Belanda sampai sekarang. Sudah barang tentu ada banyak penjelasan yang bisa diajukan, namun argumentasi yang akan dipakai dalam tulisan kali ini yaitu negara sebagai salah satu variabel penting yang memberi kontribusi dalam keterpisahan etnis Cina tersebut. Sejak jaman kolonial, keterpisahan itu telah dipelihara dan dimanipulasi untuk melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik.

Pertama akan digambarkan situasi pada masa kolonial. Lalu akan didiskusikan beberapa pemikiran

yang menjelaskan bagaimana keterpisahan etnis Cina dari masyarakat Indonesia itu terus ber-

*) Andreas A. Susanto, Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

...gung. Seterian itu akan dibahas peran negara dalam merekayasa keterpisahan tersebut.

Negara Kolonial dan Segregasi Etnis Cina: Warisan Masa Lalu

Bagian ini akan membahas kebijakan separatis dari pemerintah kolonial Belanda yang akan memberikan latar belakang historis bagi pemahaman kita terhadap keterpisahan etnis Cina dari masyarakat Indonesia umumnya dewasa ini.

Pada dasarnya memang sudah menjadi niat dari penguasa kolonial untuk mencegah terjadinya persatuan antaretnis. Pemerintah kolonial menganggap bahwa monopoli dan otoritas mereka akan terancam apabila berbagai kelompok etnis yang ada saat itu menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka (Simbolon, 1991: 40).

Tahun 1835 pemerintah kolonial menerapkan apa yang disebut *Wijkenstelsel* (zona pemukiman) yaitu peraturan hukum yang mengharuskan orang-orang Cina untuk tinggal di suatu kawasan yang telah ditentukan (yang kemudian dikenal sebagai Pecinan) dan terisolasi dari golongan etnis yang lain. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan denda yang berat (Williams, 1960: 31). Sistem zona ini menghalangi orang Cina untuk

bisa tinggal di tengah penduduk pribumi, dengan begitu membatasi komunikasi di antara mereka. Walaupun kebanyakan orang Cina sudah tinggal bersama di kawasan tertentu sebelum peraturan itu berlaku, namun *ghetto* resmi ini mengungkung komunitas ini dengan pagar hukum untuk makin mempersulit terjadinya interaksi dengan kelompok-kelompok etnis lain, dan memperkuat karakter spasial dan fisik yang sudah ada (Widodo, 1988: 2).

Pengungkungan komunitas orang Cina di suatu kawasan khusus diperketat lagi dengan *Passenstelsel*. Peraturan ini melarang orang Cina untuk pergi berdagang ke pedesaan atau melakukan perjalanan keluar dari tempat mereka ke tempat lain tanpa memiliki surat jalan dari pihak yang berwenang untuk setiap kali melakukan perjalanan (Willmot, 1961: 2). Bukan surat jalan itu semata-mata yang kemudian membuat orang Cina enggan meninggalkan kawasan pemukimannya, tetapi lebih terutama karena proses untuk memperoleh surat jalan itu yang rumit, bertele-tele dan kadang melecehkan (Liem, 1930: 88). Tidak pelak lagi stelsel itu telah semakin memperkuat konsentrasi orang Cina di kota-kota dan khususnya di Pecinan. Oleh karena mereka hidup relatif ter-

isolasi dari etnis lain, identitas mereka yang unik pun terus bertahan.

Lebih jauh lagi, pemerintah kolonial juga mewajibkan orang Cina untuk tetap mempertahankan dandanan rambutnya yaitu kucir panjang yang dikepang, dan dilarang mengenakan pakaian model Barat atau dari etnis lain (Liem, 1930: 153-154). Sejak tahun 1717 orang Cina tidak diperbolehkan menikah dengan orang dari luar kelompok etnis mereka (The, 1993: 63). Fakta-fakta tersebut mengilustrasikan bagaimana pemerintah kolonial Belanda secara aktif berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya berbaurnya batas-batas etnis.

Kebijakan penting yang ikut meningkatkan keterpisahan etnis Cina dari masyarakat pribumi ialah sistem status yang membagi stratifikasi sosial secara hierarkhis menjadi 3 kelompok yaitu golongan Eropa di atas, golongan Timur Asing di tengah, dan golongan pribumi di bawah. Masing-masing golongan memiliki status dan hak-hak yang berbeda, dan secara umum orang Cina yang masuk kategori Timur Asing berada pada posisi yang lebih menguntungkan daripada golongan pribumi (Coppel, 1983: 13). Oleh karena itu asimilasi dengan golongan pribumi akan mengakibatkan penurunan sta-

tus sosial dan sekaligus kehilangan hak-hak istimewanya.

Keterpisahan etnis Cina di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah kolonial. Penguasa waktu itu memberikan berbagai monopoli dari penarikan pajak, distribusi perdagangan komoditas tertentu, dan lain-lain kepada segelintir orang Cina yang kaya dan mempunyai koneksi dekat dengan mereka. Di satu pihak, dengan memanfaatkan orang Cina para penguasa kolonial memperoleh hasil pajak yang besar tanpa harus kerja keras sendiri. Di pihak lain, individu-individu Cina yang menjadi kroni penguasa tersebut juga berhasil membuat keuntungan yang tidak kalah besarnya dari kolusi itu (Cator, 1936: 97-99; Williams, 1960: 24-27).

Namun demikian, setiap kali muncul kritik atau protes terhadap penurunan kesejahteraan penduduk pribumi, para pejabat kolonial seringkali mengkaitkannya dengan orang Cina yang kegiatannya sebagai pemungut cukai/pajak dan rentenir bisa dengan mudah dituduh menggerogoti kesejahteraan rakyat. Lalu pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk menghapus hak-hak monopoli orang Cina, membentuk badan perkreditan rakyat, serta memperketat *Wijkenstelsel* dan *Passen-*

stelsel (Williams, 1961: 35-42). Pada tahun 1870 muncul aturan agraria yang praktis membuat orang Cina tidak dapat membeli atau menyewa tanah di pedesaan (Phoa, 1992: 13).

Sepanjang abad ke-19 kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial terus berubah-ubah dari memberikan semacam proteksi kepada kelompok orang Cina ke bentuk represi dan kemudian perbaikan kembali. Komunitas orang Cina memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan ekonomi di Hindia Belanda, dan di sisi lain mereka juga mudah dijadikan kambing hitam atas ketidakpuasan rakyat pada saat-saat genting. Seperti dikemukakan oleh Wertheim (1964: 55), bahwa akhirnya menjadi kebiasaan untuk menaruh kesalahan di atas pundak orang Cina atas keteringgalan masyarakat pribumi.

Tindakan-tindakan terhadap etnis Cina yang diambil pemerintah kolonial (yang menempatkan mereka sebagai warganegara kelas dua) memainkan peran penting dalam mengembangkan kesadaran nasional mereka. Ini melahirkan sekolah-sekolah dan berbagai perkumpulan yang dikai untuk memurnikan kebudayaan Cina dan mencapai tujuan-tujuan kelompok etnis tersebut. Gerakan nasionalis orang Cina ini juga semakin

memperkuat identitas mereka sebagai sebuah kelompok etnis, dan konsekuensinya membuat mereka menjadi lebih sadar dan bangga akan ke-Cinaannya. Oleh karena itu, di awal abad ke-20 orang Cina menjadi semakin orang-orang pribumi mereka menjadi kian asing. Ini tentu saja menciptakan halangan bagi integrasi orang Cina ke dalam masyarakat pribumi.

Pemerintah kolonial menanggapi kebangkitan nasionalisme orang Cina di Hindia Belanda ini dengan menghapuskan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Kemudian pada tahun 1908 pemerintah juga membangun sekolah khusus untuk anak-anak orang Cina, sebelumnya hanya segelintir saja (anak dari kalangan elite Cina) yang dapat memperoleh pendidikan Belanda. Lalu ketika *Volkssraad* dibentuk, golongan etnis Cina diberi perwakilan terpisah dari golongan pribumi, dengan jumlah cukup besar yang tidak proporsional (Coppel, 1983: 15). Orang-orang Cina yang diangkat menjadi anggota *Volkssraad* itu terutama diambil dari kelompok yang berorientasi kepada Belanda, karenanya suara mereka seringkali berseberangan dengan suara wakil golongan nasionalis Indonesia di badan tersebut (Wil-mott, 1961: 11).

Kiranya dapat terlihat de-

ngan jelas bahwa kebijaksanaan pemerintah kolonial mempunyai pengaruh yang besar dalam membuat golongan etnis Cina terpisah dari masyarakat Indonesia, dan menajamkan perbedaan-perbedaan kepentingan dari keduanya. Bahkan andai pun hasrat untuk berasimilasi itu ada, peraturan penguasa dengan segala konsekuensinya akan membuat hasrat tersebut demikian sulit diwujudkan. Namun begitu, ini akan menjadi bias apabila mengabaikan fakta bahwa sampai batas tertentu, kelangsungan sebuah masyarakat Cina yang terpisah sebetulnya juga disebabkan oleh faktor-faktor penghalang yang secara sadar atau tidak sadar diciptakan sendiri oleh orang Cina. Keterpisahan etnis Cina memang sengaja dipaksakan oleh Pemerintah kolonial Belanda, tetapi boleh jadi juga kemudian dipertegas oleh mereka sendiri. Faktor eksternal dan internal itu mendorong terbukanya jurang pemisah antara orang Cina dan masyarakat pribumi.

Perspektif dan Analisis

Bagian ini akan membahas beberapa penjelasan atau analisa yang mencoba menerangkan mengapa dan bagaimana keterpisahan etnis Cina di Indonesia terus berlangsung.

Apabila kebijaksanaan pe-

merintah kolonial sering disalahkan sebagai sumber penyebab terjadinya keterpisahan etnis Cina dari masyarakat pribumi, mestinya gambaran dari hubungan kedua golongan ini akan berbeda setelah kemerdekaan di mana pemerintahan dipegang orang Indonesia sendiri. Namun walaupun situasinya tampak cukup ideal bagi berkembangnya interaksi sosial yang lebih intense, itu ternyata tidak terjadi juga.

Menurut Palmier (1960: 122-23), interaksi sosial itu terhambat karena kesempatan atau harapan hidup yang terbuka bagi kedua kelompok masyarakat (Cina dan pribumi) itu cukup berbeda. Secara umum, golongan pribumi lebih cenderung memilih kesempatan hidupnya dalam dunia birokrasi pemerintah, sedangkan orang Cina cenderung ke dunia perdagangan. Sebuah studi di beberapa kota Jawa Timur juga menunjukkan adanya perbedaan cita-cita dalam hidup antara orang Cina dan Madura. Sementara orang Cina umumnya memimpikan sukses dalam bisnis dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya agar dapat memungkinkan mereka menaiki tangga status sosio-ekonomi, kebanyakan orang Madura menganggakan untuk mengumpulkan emas, naik haji, dan memiliki tanah di kampung halamannya (Oetomo, 1991: 17). Fakta bah-

wa kesempatan atau harapan hidup orang pribumi tergantung pada orang pribumi yang lain, demikian halnya dengan orang Cina, tidak melahirkan dorongan bagi keduanya untuk memasuki hubungan sosial satu sama lain.

Lebih jauh lagi, minat dan kepentingan mereka tidak berhubungan satu sama lain, kecuali dalam kelompoknya sendiri. Dan oleh karena kedua kelompok ini merupakan bagian dari dua sistem status yang berlainan, maka sangsi sosial yang dikenakan pun hanya bisa diterapkan oleh para anggota dari kelompok masing-masing. Nilai-nilai keduanya kadang bukan hanya berbeda tapi saling berseberangan. Hubungan dengan orang-orang dari kelompok lain tidak pula menaikkan status di mata orang-orang di kelompoknya, atau bahkan malah sebaliknya malah menurunkan.

Apa yang digambarkan di atas kiranya sejalan dengan apa yang dilukiskan oleh Furnivall sebagai masyarakat plural. Menurutnya, masyarakat plural terpecah ke dalam golongan-golongan yang tak saling berhubungan, *living side by side, yet without mingling* (1976: 446) Seperti sebuah medley, elemen-elemennya bermacam-macam tetapi tidak merupakan sebuah kombinasi harmonis yang menghasilkan sebuah orkestra.

Masing-masing kelompok atau golongan memegang agama, pandangan hidup, cita-cita dan budayanya sendiri-sendiri. Satu-satunya arena yang mempertemukan para anggota dari golongan-golongan yang berbeda itu hanya di lapangan ekonomi (pasar). Seperti telah diketahui secara luas bahwa sejak kemerdekaan telah semakin banyak orang Cina dan pribumi yang bekerjasama dalam berbagai bisnis dan asosiasi pengusaha/pedagang. Hubungan bisnis ini ternyata tidak selalu atau jarang berimplikasi pada peningkatan hubungan sosial.

Bagi Muijzenberg, Furnivall terlalu banyak menekankan pada paham golongan dalam masyarakat plural. Faktor disintegrasi antargolongan rasial juga terlalu ditekankan sehingga seakan-akan kelompok-kelompok itu memiliki sebuah kesadaran diri (dalam Columbijn, 1994: 67). Sebab itu sebagai sebuah alat untuk menganalisa realitas sosial, konsep Furnivall nampaknya memang terlalu kaku.

Namun demikian, bagi kebanyakan orang yang menggunakan pendekatan pluralistik relasi antara etnis Cina dan masyarakat pribumi memang masih ditandai dengan kurangnya integrasi dan oleh absennya kesamaan nilai sosial dan kultural (Willmott, 1960; Tan, 1963; Oeto-

mo, 1984). Bahkan sebagaimana dicatat oleh studi Palmier (1960), orang Cina dan pribumi yang sering berjumpa dalam gereja, yang sama saja, kemudian tidak diikuti dengan perkenalan yang lebih dekat.

Kontak antarkedua golongan pada berbagai kesempatan di luar pasar sebetulnya juga cukup banyak terjadi. Mereka bisa saja terlibat kerjasama dalam kepantiaian perayaan hari-hari nasional atau hari raya, gotong royong, pengumpulan dana untuk korban banjir, namun pada sisi lain, itu semua tidak banyak menghasilkan hubungan yang lebih intim. Dalam hal ini, Melly Tan menerangkannya sebagai perbedaan antara interaksi sosial dalam institusi publik (seperti gereja, sekolah, organisasi formal, dan perusahaan) dan dalam institusi privat (seperti klub sosial, klub sport, rekreasi, perkawinan). Ini mungkin sedikit banyak juga menjelaskan mengapa perkawinan antara kedua golongan jarang terjadi meskipun keduanya belajar di sekolah yang sama atau bekerja di perusahaan yang sama, bahkan beribadah di tempat yang sama.

Dari bahasan di atas tentu masih terbuka untuk mempertanyakan apakah memang perbedaan kultural yang menjadi akar dari keterpisahan etnis Cina di Indonesia. Menurut Wertheim tidak-

lah demikian, perbedaan kultural bukan faktor utama yang menentukan timbulnya ketegangan atau konflik antara minoritas etnis Cina dan mayoritas pribumi, melainkan kompetisi ekonomi (1964: 69).

Dalam analisa Wertheim, sebagian orang pribumi yang pada awalnya memanipulasi sentimen nasional dan agama untuk mengedepankan kepentingan mereka sebagai sebuah golongan. Para pengusaha atau pedagang pribumi menggunakan bendera agama sebagai ideologi penyatu untuk melawan orang Cina saingan mereka yang lebih kuat. Demikian juga, kelompok nasionalis sekuler menggunakan nasionalisme untuk tujuan yang serupa, dengan memvonis saingannya sebagai orang asing yang tidak mau berbaur dengan masyarakat tuan rumah (Wertheim, 1964: 81). Persaingan ini telah menambah kedahsyatan kampanye anti-Cina yang dilancarkan secara periodik. Kelas pengusaha pribumi ini berusaha mencari dukungan terutama dari kelas bawah urban yang umumnya paling menderita akibat praktek *rent-seeking*, kolusi dan korupsi, di mana para pedagang asing ini dituduh sebagai penyebab terjadinya malpraktek tersebut.

Dalam pengamatan Wertheim, kenyataan yang ada me-

nunjukkan bahwa relasi kedua golongan justru makin memburuk pada saat perbedaan kultural mulai memudar sampai pada batas di mana persaingan menjadi dimungkinkan. Kurangnya asimilasi bukan motif sebenarnya yang mau diajukan dalam kampanye, tetapi lebih karena itu merupakan suatu rasionalisasi yang cocok. Ia memberikan alasan yang bagus untuk memilih sebuah kelompok "outsider, aliens" sebagai target. Tujuan utamanya ialah untuk menghalau orang Cina dalam rangka untuk bisa masuk menggantikan posisi kekuatan ekonomi. Oleh karena itu problem pengusaha pribumi ini tidak akan selesai dengan asimilasi masal dari pesaingnya (Wertheim, 1964: 79). Justru mungkin sebaliknya, andai etnis Cina secara kolektif berhasil melakukan asimilasi, maka akan hilanglah alasan untuk meniadakan persaingan dan tidak ada lagi yang bisa dikambinghitamkan secara mudah.

Wertheim boleh jadi terlalu berlebihan dalam menilai *hidden agenda* yang ada di balik usaha-usaha mendorong asimilasi dan pengembangan bisnis pribumi. Namun demikian, gagasan sebenarnya tentang pertarungan di nedan ekonomi masih mengilami media dan pemikiran intelektual sampai sekarang (Robison, 1986; Schwarz, 1994). Yang

kurang diperhatikan dalam analisa Wertheim ialah peran dari negara.

Negara Indonesia dan Minoritas Etnis Cina

Bagian ini akan mengkaji dampak dari kebijakan pemerintah dan perlakuan negara terhadap golongan minoritas etnis Cina. Fokus akan lebih ditekankan pada era Orde Baru, sejak etnis Cina ada di bawah tekanan yang lebih kuat untuk berasimilasi. Meskipun tampaknya pemerintah Indonesia berusaha untuk mengasimilasikan etnis Cina ke dalam bangsa Indonesia, namun kebijakan yang ditempuh masih merupakan campuran antara sifat asimilasionis dan separatis.

Kewarnegaraan

Konstitusi negara Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) adalah orang Indonesia asli dan mereka dari bangsa lain yang menjadi WNI oleh penetapan hukum (naturalisasi). Dengan demikian, kewarnegaraan itu diperoleh oleh penduduk asli secara otomatis, tetapi tidak otomatis bagi golongan lain kecuali mereka terlebih dulu memenuhi kondisi/kriteria tertentu.

Istilah warga negara Indonesia telah sejak semula memiliki

aroma legalistik yang artifisial (Coppel, 1983: 3). Dalam percakapan sehari-hari, apabila orang disebut WNI maka biasanya sudah umum dipahami bahwa yang dimaksud adalah keturunan asing (lebih khusus lagi Cina) dan bukan asli. Jadi WNI sebetulnya merupakan kependekan dari WNI keturunan asing. Biasanya dalam berbagai dokumen orang Cina memang ditulis secara lengkap, kalau pun tidak maka akan diberi kode khusus untuk menandai keturunan asing tersebut.

Penggunaan kata asing jelas menekankan keasingan dari orang Cina yang menjadi WNI. Bukan kata itu saja yang tetap mengingatkan orang Cina akan ke-Cinaannya, tetapi juga karena mereka selalu harus membuktikan kewarganegaraannya dengan menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) setiap kali mereka mengurus sekolah, paspor, dan lain sebagainya (sesuatu yang tidak perlu bagi warga negara pribumi).

Kiranya jelas bahwa kriteria legal, tidak selalu sesuai dengan realitas sosial. Banyak WNI keturunan Cina yang merasa tetap dilihat tetap sebagai orang Cina (asing), oleh karena itu diperlakukan berbeda (bukan istimewa). Misalnya, mereka selalu harus memenuhi persyaratan lebih banyak dan membayar lebih

mahal daripada WNI pribumi. Dengan demikian yang terjadi adalah terlepas dari seberapa jauh mereka telah berusaha mengidentifikasi diri dan bersekutu dengan masyarakat Indonesia, seorang WNI keturunan Cina tetaplah pertama-tama dipandang dan diperlakukan secara sosial maupun hukum sebagai orang Cina, serta dikaitkan dengan masyarakat Cina. Ini kiranya bisa dipahami mengingat identitas pertama dan mungkin terpenting yang dilihat membedakan kelompok etnis satu dengan yang lain ialah ciri biologis (lihat Somers-Heidhues, 1996).

Dalam kasus kewarganegaraan ini muncul pemikiran yang mengusulkan agar dasarnya diganti dari *ius sanguinis* ke *ius soli*, dengan begitu semua anak yang dilahirkan di bumi Indonesia, meskipun orangtuanya keturunan Cina akan otomatis menjadi WNI seperti yang pribumi.

Kebijakan Kultural dan Pendidikan

Selama pemerintahan Orde Baru dan sampai sekarang serangkaian peraturan diimplementasikan dengan maksud untuk mempercepat proses asimilasi. Berdasarkan instruksi pemerintah, kegiatan religius orang Cina yang mempunyai keterkaitan kultural dengan negara asal hanya boleh diekspresikan

secara pribadi, dan segala bentuk perayaan yang berhubungan dengan kepercayaan dan tradisi Cina hanya boleh diselenggarakan dalam batas rumah masing-masing (Tan, 1991: 117). Mereka yang masih mempergunakan nama Cina juga didesak untuk menggantinya dengan nama Indonesia (apakah nama-nama seperti Salim, Prayogo, Tanzil bisa disebut Indonesia, dari kamata anthropologi tentu masih bisa dipersoalkan). Sementara peraturan lain berkaitan dengan pelarangan penggunaan aksara Cina di media massa, serta penjualan hasil penerbitan yang memakai bahasa Cina. Buku, majalah, film, dan kaset berbahasa Cina merupakan barang-barang yang terlarang untuk dibawa masuk ke dalam negara RI.

Dari kebijaksanaan dan peraturan tersebut jelas kiranya bahwa bagi pemerintah, asimilasi berarti lenyapnya sebuah kelompok etnis sebagai suatu entitas sosio-kultural. Segala bentuk keterkaitan kultural yang ber-sumber pada negeri asal harus lihilangkan agar dapat memberi ruang atau kesempatan bagi elemen-elemen kultural pribumi untuk tumbuh dan berkembang (Tan, 1991: 114). Ini bermakna orang Cina harus mengingkari dan membuang ke-Cinaannya, lalu meleburkan dirinya ke da-

lam masyarakat pribumi.

Namun dalam kenyataannya, implementasi dari peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sosio-kultural etnis Cina itu tidak selalu tegas dan konsisten. Dalam berbagai situasi, terlihat bahwa implementasi tersebut banyak ditentukan oleh sikap pribadi dari masing-masing pejabat pemerintah (birokrasi atau militer) terhadap etnis Cina. Pertunjukan opera *Sam Pek Eng Tai* (yang mempergunakan bahasa Indonesia) misalnya, boleh dipertunjukkan di Jakarta tetapi ditolak ijin pementasannya oleh pihak berwenang di Medan. Sementara itu, film-film bioskop dan kaset video Mandarin dari Hongkong atau Taiwan dapat dipertontonkan atau disewa; para penyanyi berbahasa Mandarin juga secara teratur mengisi acara di berbagai hotel dan restoran di kota-kota besar Indonesia (termasuk Medan sudah barang tentu).

Di samping ada peraturan resmi yang jelas, ada pula beberapa kebijakan yang diterapkan secara terselubung atau dengan cara yang lebih halus. Ini terutama terjadi di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Meskipun secara resmi pemerintah mendorong terjadinya asimilasi melalui dunia pendidikan, namun pada saat yang bersamaan juga membatasi secara ketat masuk-

nya anak-anak keturunan Cina dalam sekolah-sekolah atau universitas negeri. Oleh karenanya tidak mengherankan bila kemudian mereka terkonsentrasi di lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ini tentunya membuka peluang bagi terciptanya eksklusivitas baru. Pemerintah kemudian menekan lembaga pendidikan swasta tersebut untuk juga ikut membatasi keberadaan peserta didik dari keturunan Cina supaya lebih proporsional dengan yang pribumi. Kebijakan yang memperlakukan etnis Cina secara diskriminatif ini jelas hanya mempertegas garis perbedaan mereka dengan masyarakat pribumi.

Hambatan yang kurang lebih serupa dirasakan terjadi pula dalam kesempatan yang dibuka bagi orang Cina di sektor nonbisnis. Ada semacam pengkaplingan peluang yang tak tertulis di mana bagi orang Cina jalan lebar untuk mencapai puncak karier hanya terbuka di bisnis swasta, sedang dalam profesi lain seperti militer atau pegawai negeri ada semacam kuota yang membatasi. Bahkan walaupun akhirnya mereka berhasil diterima di dinas tersebut, umumnya karier mereka akan berakhir pada posisi medioker saja. Dengan mendorong orang Cina untuk tetap bertahan di sektor bisnis, maka dikotomi etnis dalam

profesi pun terus berlangsung. Padahal kalau dilihat pada masa kolonial sampai sebelum Orde Baru, biarpun tidak dominan tetapi cukup banyak orang Cina yang bergiat di luar bidang bisnis, seperti menjadi wartawan, penulis/sastrawan, politisi, intelektual, dan lain sebagainya.

Kebijaksanaan Ekonomi

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah mulai melancarkan proses pribumisasi di sektor ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi etnis Cina dan mengembangkan wiraswasta pribumi. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1959 yang melarang orang Cina melakukan perdagangan di pedesaan (Mackie, 1976: 8297). Larangan tersebut mengakibatkan eksodusnya orang-orang Cina ke perkotaan, dengan begitu mempertegas dikotomi domisili.

Dalam usaha untuk membangun kekuatan ekonomi pribumi yang dikenal dengan Politik Benteng, dikeluarkan peraturan yang mengharuskan pemerintah memberi prioritas kepada pengusaha pribumi dalam pembelian barang-barang dan pemberian kontrak kerja. Oleh karena banyak sektor bisnis yang kemudian tertutup bagi pengusaha Cina, dan lisensi mereka juga

tidak dapat diperpanjang lagi (Suryadinata 1993: 95). Kebijakan yang dinilai diskriminatif ini bukan saja membuat pelaku bisnis dari kedua golongan itu jadi terpisah, tetapi lebih dari itu ia semakin mempertebal solidaritas etnis di antara pengusaha Cina.

Baru kemudian pada era Orde Baru, etnis Cina sebagai sebuah kelompok memperoleh peluang yang besar untuk memperluas bisnisnya. Ini yang kemudian membuat keberadaan mereka terlihat mencolok, sehingga seringkali menjadi sasaran kecemburuan sosial. Pemihakan atau kedekatan Suharto pada pengusaha Cina yang menjadi kroninya menambah permusuhan dan kebencian terhadap mereka. Pada titik inilah, orang Cina dapat dijadikan sebagai kambing hitam yang pas bagi kegagalan pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial.

Ilustrasi yang baik dicerminkan melalui kasus Tapos. Pada tanggal 4 Maret 1990, Suharto mengundang 31 konglomerat (21 di antaranya pengusaha Cina) ke *ranch*-nya di Tapos. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional Suharto mengingatkan para konglomerat tersebut bahwa mereka sekarang telah berhasil menjadi kaya itu tidak lain karena kesempatan yang diberikan oleh bangsa dan negara ini, oleh karenanya mere-

ka perlu membalas budi. Pada intinya Suharto menuntut para konglomerat itu untuk menjual 25 persen dari saham mereka kepada koperasi. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial yang dapat meledak menjadi kerusuhan massa (Tempo, 10 Maret & 14 April 1990).

Melalui pidatonya di Tapos itu, Suharto secara tidak langsung telah menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa komunitas bisnis Cina lah yang bertanggung jawab terhadap kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan melakukan itu dia sebetulnya telah merusakkan usaha keras Orde Baru selama itu untuk menyembunyikan ketegangan atau konflik etnis ke bawah permukaan (antara lain dengan melarang segala hal yang berkaitan dengan SARA). Pidato dan siaran tersebut telah menguatkan kesan banyak orang bahwa kelompok pengusaha Cina secara kolektif merupakan kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada pemerintah. Efek yang diinginkan pada pokoknya ialah untuk menakut-nakuti pengusaha Cina agar mau membantu Suharto meredam ketidakpuasan rakyat. Pengalihan sebagian saham kepada koperasi lebih merupakan bagian dari strategi politik teater belaka, untuk menimbulkan *special effects*.

Kejadian Tapos tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Suharto yang paternalistik ikut memberi kontribusi yang penting terhadap ketegangan hubungan etnis Cina dan pribumi. Bahkan seandainya Suharto untuk kepentingan politiknya sendiri, merasa perlu memelihara hubungan pribadi yang dekat dengan para pelaku bisnis utama negeri ini, kenapa harus mereka yang dari etnis Cina, dan bukan yang pribumi? Spekulasi yang beredar ialah bahwa betapa pun besar dan kuatnya pengusaha-pengusaha Cina tersebut mereka tidak dapat berkembang menjadi ancaman bagi Suharto sebab mereka tidak akan pernah bisa memperoleh dukungan luas masyarakat pribumi (apalagi selama mereka bisa dipisahkan dari mayoritas pribumi dan terus ditempatkan sebagai *outsider* dan *aliens*). Tetapi kelompok pengusaha pribumi yang kuat secara ekonomi dan lepas dari patronasi penguasa akan berbeda ceritanya. Sebuah kelas pengusaha pribumi yang independen akan merupakan ancaman potensial bagi penguasa (Schwarz, 1994: 127).

Namun di mata kebanyakan orang Cina sendiri sebetulnya hubungan dekat segelintir konglomerat Cina dengan Suharto itu dilihat sebagai ancaman serius bagi keselamatan mereka di ke-

mudian hari. Seperti dikatakan oleh seorang pengusaha Cina yang tidak punya afiliasi dengan pemerintah: "*It doesn't matter how much we try to work with pribumi or help small pribumi businessmen, if at the end of the day resentment boils over, all the Chinese will suffer.*" (Schwarz, 1994: 131).

Penutup

Keberhasilan Orde Baru dalam mengasimilasikan minoritas etnis Cina di Indonesia memang tidak bisa diabaikan. Kiranya cukup layak untuk mengatakan sebagian besar orang Cina dewasa ini mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia. Mereka sudah tidak bisa berbicara dalam bahasa Cina, kebanyakan sudah tidak menganut kepercayaan tradisional Cina, dan sudah jarang yang merayakan tradisi-tradisinya.

Namun demikian, mungkin orang harus dapat membedakan antara apa yang disebut proses akulturasi dan proses integrasi sosial. Yang pertama berkaitan dengan makin memudarnya tradisi budaya Cina yang asli dan diadopsinya sejumlah elemen budaya lokal. Dalam hal ini pemerintah mungkin telah berhasil membuat orang Cina menjadi *less Chinese* dengan menghilangkan sebagian besar ke-Cina-

annya. Tetapi sebaliknya dari yang diharapkan, proses integrasi sosial tetap tidak berjalan lancar, sebagaimana terlihat dari masih terpisahnya etnis Cina dari mayoritas penduduk.

Dari itu perlu ditinjau kembali bagaimana kebijaksanaan dan perlakuan pemerintah terhadap etnis Cina ikut memberi kontribusi terhadap keterpisahan tersebut. Oleh karena merasa tetap selalu didiskriminasi meskipun mereka telah menuruti berbagai ketentuan pemerintah, serta melepaskan tradisi dan atribut Cina, telah membuat banyak orang Cina merasa frustrasi. Mereka yang sudah sedemikian rupa hidup berbaur dengan masyarakat pribumi pun akhirnya kembali kecewa ketika kerusuhan timbul toh mereka tetap jadi sasaran juga semata-mata karena mata dan kulit mereka yang berbeda. Sebab itu, mereka kemudian cenderung menarik diri ke dalam kelompoknya sendiri dan memperkuat identitas dan solidaritas etnis. Kalaupun mereka tidak menekankan ke-Cinaannya, paling tidak mereka akan melihat dirinya berbeda dari etnis pribumi lain.

Meskipun asimilasi tetap bisa saja menjadi pilihan pribadi bagi individu tertentu, namun sebagai sebuah kelompok, reaksi yang umum terhadap diskriminasi adalah meningkatkan solidaritas

golongan. Untuk mencapai itu, para anggotanya akan menekankan ciri-ciri kultural tertentu yang membedakan mereka dari golongan mayoritas. Dengan melakukan itu sebetulnya mereka tetap saja membahayakan posisinya sendiri sebagai suatu kelompok. Itulah tidak lain dari dilema etnis Cina di Indonesia.

Kembali ke argumentasi utama dari tulisan ini, pemerintah mempunyai peran yang sentral dalam melakukan proses integrasi sosial antara golongan etnis Cina dan pribumi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa persoalan yang selama ini timbul dari ketegangan hubungan antara kedua golongan dapat sangat diminimalisasikan, tergantung dari seberapa jauh negara dapat menyelenggarakan suatu pemerintahan dan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat luas untuk dapat menerima perbedaan, untuk tidak rasialis, untuk tidak diskriminatif, tetapi negara dengan legitimasi hukumnya dapat memaksa agar tata hubungan antaranggota masyarakat, antaranggota masyarakat dan negara, yang berkeadilan (semua warganegara sama kedudukan dan haknya di muka hukum) dapat ditegakkan, ditaati oleh semua warganegara tanpa kecuali.

Daftar Pustaka

- Cator, W.J., (1936), *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies*, Oxford: Blackwell.
- Columbijn, F., (1994), *Patches of Padang: the History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*, Leiden: PhD disertasi.
- Coppel, C.A., (1983), *Indonesian Chinese in Crisis*, Kuala Lumpur: Oxford Univ. Press.
- Furnivall, J.S., (1976), *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Amsterdam: Israel.
- Liem Thian Joe, (1933), *Riwayat Semarang, 1416-1931*. Semarang: Ho Kim Yoe.
- Mackie, J.A.C., (1976), *Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia, 1959-68*, dalam JAC Mackie (ed.), *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, hal.77-138. Melbourne: Nelson.
- Oetomo, Dede, (1991), "Chinese-Madurese Relations in Surabaya", *Makalah pada Workshop Madurese Culture and Society*, Leiden, 7-11 Oktober 1991.
- Palmier, Leslie H., (1960), *Social Status and Power in Java*, London: LSE.
- Robison, R., (1986), *Indonesia: The Rise of Capital*, Sidney: Allen & Unwin.
- Suryadinata, L., (1993), *Chinese Adaptation and Diversity: Essays on Society and Literature in Indonesia*, Malaysia, Singapore, hal. 77-100. Singapore: SUP.
- Schwarz, A., (1994), *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s*. Sidney: Allen & Unwin.
- Siegel, J.T. (1986), *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesia City*, New Jersey: Princeton University Press.
- Simbolon, P.T., (1991), *Tapping on the Wall: Ethnicity and Marketplace Trade in the Urban Context of Jakarta*. Amsterdam: VU University Press (PhD disertasi).
- Tan Giok Lan, (1963), *The Chinese of Sukabumi: A Study of Social and Cultural Accommodation*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program.
- Tan, Melly G., (1991), *The Social and Cultural Dimensions of the Role of Ethnic Chinese in Indonesia Society*, Indonesia.
- The Siauw Giap, (1992), *Islam and Chinese Assimilation in Indonesia and Malaysia*, dalam Cheu Hock Tong (ed.), *Chinese Beliefs*

- and Practices in Southeast Asia*. Selangor: Pelanduk Publications.
- Wertheim, W.F., (1964), *The Trading Minorities in Southeast Asia, dalam East-West Parallels: Sociological Approaches*, hal. 39-84, The Hague: Van Houve.
- Widodo, J., (1988), *Chinese Settlement in A Changing City: An Architectural Study of the Urban Chinese Settlement in Semarang*, Leuven: Tesis MA.
- Williams, L.E., (1960), *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia, 1990-1916*. Glencoe Illinois: The Free Press.
- Willmott D.E., (1960), *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Willmott, D.E., (1961), *The National Status of the Chinese in Indonesia, 1900-58*, Ithaca: Southeast Asia Program Cornell University.